



Panji : Dana Bansos Jangan untuk Pencitraan Politis

MELAWI, SP - Bupati Melawi, Panji mengingatkan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah semestinya disesuaikan dengan ketentuan. Jangan sampai justru kegiatan yang dijalankan dari dana hibah pemda bermuatan politis. Diakhir tahun, seluruh organisasi, lembaga maupun pihak yang menerima dana tersebut harus melaporkannya pada pemerintah.

"Para pimpinan organisasi yang menerima dana hibah maupun bansos supaya mengelola bantuan dari Pemda tersebut dengan baik, tidak menyimpang dan tidak menjadi sasaran pengawasan," pesannya saat membuka kegiatan sosialisasi laporan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos, Selasa (19/12) di pendopo rumah jabatan bupati.

Panji juga menegaskan, dirinya tidak mau penggunaan dana hibah dan bansos yang disalurkan oleh pemerintah tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bermuatan politis. Apalagi sekarang sudah menjelang tahun politik. Untuk mendapatkan pencitraan melalui dana hibah dan bansos.

"Saya tidak mau pintu dana hibah dan bansos menjadi persaingan politis," ujarnya.

Selain itu, kata Panji, pengaru h dana hibah dan

bansos luar biasa terhadap laporan keuangan pemerintah. Bahkan sampai hari ini Kabupaten Melawi belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun baru sebatas mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Salah satu kendala kita untuk WTP adalah persoalan aset, hibah dan bansos," ujarnya.

Karena itu, Panji mengharapkan kepada lembaga atau organisasi yang mendapatkan dana hibah dan bansos harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos tersebut. Misalnya membeli barang, minta kuitansi dari toko. Sehingga kalau suatu saat dicek, bisa dipertanggungjawabkan.

"Seharusnya setelah dapat dana hibah dan bansos, penuhi kewajiban membuat laporan pertanggungjawabannya," tegasnya. **(eko/bah)**

